



PUTUSAN

NOMOR : /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sales, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan rumah makan, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor **/Pdt.G/2018/PA.Lpk** pada tanggal 09 Agustus 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 04 Pebruari 2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/53/II/2001 tertanggal 05 Pebruari 2001;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat dan Tergugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga selama 17 tahun namun belum dikaruniai anak;
 - b. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, karenanya Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, disebabkan penyakit;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mendiamkan Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar tidur, dimana Penggugat tidur dikamar bersama dan Tergugat tidur dikamar lainnya;
8. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juli 2018 siang hari dikarenakan Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami disebabkan penyakit, padahal Penggugat sudah berupaya untuk mengatasi dan mengobati Tergugat dengan berbagai alternative. Karenanya Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/53/II/2001 tertanggal 05 Pebruari 2001; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Medan Batang Kuis Gg.Restu No.1, Dusun Karang Nongko II, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2001 lalu.

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa
pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak 3 tahun lalu selalu terjadi perselisihan yang terus menerus ;

-----Bahwa
saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat selalu diam-diaman tanpa bertegur sapa selama satu minggu;

-----Bahwa
penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat, dan Tergugat belum mempunyai anak dan Tergugat berpenyakit inpoten (lemah syahwat) sehingga Penggugat selalu diam-diaman dengan Tergugat;

-----Bahwa
Penggugat ada menganjurkan Tergugat untuk berobat akan tetapi Tergugat mengabaikan dan hanya mendiamkan saja;

-----Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan lalu lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

-----Bahwa
upaya damai keluarga tidak ada dilakukan karena Penggugat tidak ingin lagi bersatu dengan Tergugat;

-----Bahwa
saksi dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SPG. pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl.Medan Batang Kuis Gg.Restu No.1, Dusun Karang Nongko II, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2001 lalu.

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa
pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak 3 tahun lalu selalu terjadi perselisihan yang terus menerus ;

-----Bahwa
saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat selalu diam-diaman tanpa bertegur sapa selama satu minggu ;

-----Bahwa
penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat, dan Tergugat belum mempunyai anak dan Tergugat berpenyakit inpoten (lemah syahwat) sehingga Penggugat selalu diam-diaman dengan Tergugat;

-----Bahwa
Penggugat ada menganjurkan Tergugat untuk berobat akan tetapi Tergugat mengabaikan dan hanya mendiamkan saja;

-----Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan lalu,lalu,karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
upaya damai keluarga tidak ada dilakukan karena Penggugat tidak ingin lagi
bersatu dengan Tergugat;

-----Bahwa
saksi dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka alat
bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap
kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada,
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar oleh Majelis karena tidak
hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian
putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang
merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama
orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk
Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka
perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh
karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili
Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1)
dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada
Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan saat ini telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu sampai dengan sekarang, alasan mana selengkapnya telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

-----Bahwa
Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi Penggugat masing-masing adalah ibu dan kakak kandung Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak 3 tahun lalu selalu terjadi perselisihan yang terus menerus, para saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat selalu diam-diaman tanpa bertegur sapa selama satu minggu ; penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat, dan Tergugat belum mempunyai anak dan Tergugat berpenyakit inpoten (lemah syahwat) sehingga Penggugat selalu diam-diaman dengan Tergugat, bahwa Penggugat ada menganjurkan Tergugat untuk berobat namun Tergugat selalu mengabaikan dan hanya mendiamkan saja; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama; Keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-----Bahwa
pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak 3 tahun lalu selalu terjadi perselisihan yang terus menerus ;

-----Bahwa
penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat, dan Tergugat belum mempunyai anak dan Tergugat berpenyakit inpoten (lemah syahwat);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan lalu lalu,karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah kembali hidup bersama, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00, (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 24 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 *Hijriyah*,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Dra. Rabiah Nasution, SH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni SH, MH** dan **Drs. Husnul Yakin SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Jasmin SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Penggugat** tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni SH, MH

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

JASMIN, SH

Perincian Biaya

- | | | | |
|----|-------------------|----|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 360.000,00,- |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,00,- |
| 5. | Materai | Rp | 6.000,00,- |
| | Jumlah | Rp | 451.000,00,- |
- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)